



Judul : Pemda Kudu Rajin Pantau Langsung Kondisi Pangan
Tanggal : Minggu, 16 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pemda Kudu Rajin Pantau
Langsung Kondisi Pangan

PARLEMEN mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) rajin terjun ke masyarakat memantau kondisi pangan. Target inflasi 3 persen yang ditetapkan Pemerintah sangat tergantung kerja keras dalam mengendalikan pangan.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan, para pejabat dan kepala daerah harus rajin memantau kondisi pangan di masyarakat.

Hermanto meminta langkah Presiden Jokowi yang sering blusukan ke pasar, harus ditindaklanjuti pula oleh perangkat kementerian terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi, harga pangan nasional terpantau dan terkendali dengan baik untuk stabilitas harga nasional," kata Hermanto kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia juga mengingatkan, kondisi pangan di setiap daerah berbeda-beda. Pasalnya, Presiden Jokowi hanya meninjau harga pada satu titik pasar, mungkin harga hanya berlaku di pasar yang dikunjungi saja.

Sementara jumlah pasar di lokasi lain sangat banyak. Secara simultan dalam waktu yang sama harga pasar sulit untuk diagregasi.

Menurutnya, harga pangan di setiap pasar bisa saja terjadi perbedaan karena dipengaruhi oleh jumlah persediaan, permintaan, perilaku konsumen perilaku pedagang, pemain pasar dan faktor non-ekonomi yang bersifat psikologis dan kebijakan politik.

Misalnya, harga pangan di pasar Tanjungsari, Sumedang bisa berbeda dengan pasar Bogor, pasar Keramat Jati dan lokasi pasar lainnya. Dari pantauan harga pangan di hari yang sama di pasar Bogor, harga daging ayam lebih mahal dibanding harga di pasar Tanjungsari.

“Tapi, harapannya kondisi harga yang bagus ada dampak transmisi ke lokasi pasar lain. Kondisi harga yang bagus juga berdampak pada kesejahteraan petani,” jelasnya.

Anggota DPR dari dapil Sumatera Barat I ini juga mengomentari target inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 3 persen di 2023.

Menurutnya, inflasi 3 persen itu sangat tergantung kerja keras Pemerintah mengendalikan faktor harga umum dengan dukungan koordinasi berbagai kementerian terkait.

“Secara katagoristik, Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan permintaan barang dan moneter,” jelasnya.

Anggota DPR dari dapil Sumatera Barat I ini juga mengomentari target inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 3 persen di 2023.

Menurutnya, inflasi 3 persen itu sangat tergantung kerja keras Pemerintah mengendalikan faktor harga umum dengan dukungan koordinasi berbagai kementerian terkait.

“Secara katagoristik, Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan permintaan barang dan moneter,” jelasnya.

Dalam pandangannya, target inflasi itu akan sulit tercapai. Pasalnya, selepas pandemi Covid-19 jumlah permintaan barang meningkat, tidak disertai dukungan kapasitas produksi sehingga pasokan barang ke



Hermanto

pasar kurang.

Saat ini, kondisi dua sisi yang saling mempengaruhi harga umum bergerak naik tajam secara simultan yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah yaitu; sisi permintaan meningkat. Dan biaya produksi meningkat yang tidak diimbangi kapasitas produksi dalam negeri.

Gap kedua sisi itu semakin melebar saat ini. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan barang ke pasar, sehingga berpotensi munculnya barang impor, baik barang kebutuhan pokok berupa pangan maupun barang kebutuhan sekunder.

“Bila kondisi tersebut terjadi, maka inflasi tiga persen bisa meleset dari target,” katanya.

Menurutnya, memenuhi kekurangan barang dari impor hanya menguntungkan pemain pasar. Dan tidak berdampak positif pada pelaku ekonomi dalam negeri terutama petani dan UMKM, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak meningkat.

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada semester I-2023 masih ditopang oleh tingginya harga komoditas unggulan.

Dia mengingatkan, pada semester II perlu diantisipasi mulai turunnya harga beberapa komoditas unggulan. Dan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang kekuatan konsumsi rumah tangga yang bergantung pergerakan inflasi,” tutur Nevi.

Politisi PKS ini menambahkan, kontribusi belanja Pemerintah masih rendah di tengah-tengah kebutuhan stimulus perekonomian.

“Investasi langsung terlaksana lambat karena kompleksitas iklim berusaha dan ekspor bergantung pada kenaikan harga komoditas,” ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi terutama pangan dan energi, telah mempengaruhi kinerja berbagai korporasi. Karena itu, dia mengingatkan kebijakan APBN mesti mampu menjaga daya beli masyarakat. ■ DIR